



**SUMBER BERITA**

**KAMIS, 31 MEI 2018**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# Dewan: Segera Tertibkan Aset Milik Daerah

**KOTA MANNA** - Untuk kedua kalinya pemerintahan Dirwan Mahmud-Gusnan Mulyadi (DG) gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kabupaten BS dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Hal ini ikut disesalkan DPRD Kabupaten BS.

Menurut anggota Komisi I DPRD BS, H. Supin, penyebab Kabupaten BS gagal meraih WTP diantaranya karena aset milik daerah belum tertib, dan tak jelas. Untuk itu, hal ini harus

menjadi perhatian pemkab terutama Plt Bupati BS Gusnan Mulyadi untuk segera menertibkan aset, termasuk kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukan agar bisa ditertibkan.

"Permasalahan utama daerah kita ini aset, itu secara kasat mata saja. Masih banyak temuan aset tidak jelas, tidak tertib. Seperti kendaraan dinas itu kacau balau. Pajak mati, peruntukan juga tidak sesuai," sesalnya.

Politisi PKPI ini juga meminta agar raihan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini, dapat menjadi

pertimbangan bagi Plt Bupati untuk mengevaluasi kinerja pejabat OPD di lingkungan Pemkab BS. Mengingat predikat WDP ini salah satu indikator kinerja OPD.

"Masalah aset ini sudah berlarut-larut, kalau memang ada aset yang sudah tidak layak pakai itu bisa diusulkan untuk dilelang, dan dihapuskan," terangnya.

Kembali gagalnya Kabupaten BS mendapat WTP juga ikut disesalkan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPRD BS Dodo Zulkan. Permasalahan yang berlarut terhadap temuan BPK sehingga menghambat

BS untuk meraih WTP harus segera diselesaikan, termasuk melakukan evaluasi pejabat di lingkungan Pemkab BS. "Evaluasi OPD, juga kalau memang perlu dilakukan mutasi kenapa tidak. Namun tentunya harus sesuai dengan aturan," kata Dodo.

Dalam rapat belum lama ini di Kantor Bupati BS, BPK kembali menemukan aset tak jelas di lingkungan Pemkab BS nilainya mencapai Rp 88 miliar. Temuan terbesar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) BS mencapai Rp 35 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (PUPR) Rp 30 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 9,07 miliar, Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Rp 1,2 miliar

Kemudian, Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi Rp 1,9 miliar, Dinas Perikanan Rp 1,7 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 1,9 miliar, Dinas Pertanian Rp 1,06 miliar, sekretariat daerah Rp 1,7 miliar. Diantara temuan itu ada aset sudah rusak berat tapi masih terdata, tidak jelas, dan yang akan dihibahkan, juga terdata ganda. (key)